

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT 10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-10/PB/2020 9 Januari 2020

Sifat : Sangat Segera Lampiran : Tiga Berkas

Hal : Kebijakan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2019

Yth. Sesuai Daftar Terlampir

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLU tahun 2019 yang bertujuan umum, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BLU tahun 2019 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran II surat ini untuk dijadikan pedoman.
- 2. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BLU tahun 2019 yang bertujuan umum dimaksud untuk mempertegas perlakuan akuntansi sebagai berikut:
 - a. Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat.
 - b. Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit.
 - c. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) di Akhir Tahun Anggaran 2019.
 - d. Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra.
 - e. Penyajian dana kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
 - f. Penyajian komparasi laporan keuangan BLU tahun 2019 bagi Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
 - g. Langkah-langkah penyusunan laporan keuangan BLU tahun 2019 yang bertujuan umum menggunakan aplikasi.
- Hal lain sehubungan dengan jadwal rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan tahun 2019 unaudited tetap berpedoman pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2157/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

R. Wiwin Istanti

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 2. Inspektur Jenderal/Inspektur/Satuan Pengawas Internal Kementerian Negara/Lembaga
- 3. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
- 4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
- 5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
- 6. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia



LAMPIRAN I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S- /PB/2020 Tanggal : Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga:		
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat		
2	Dewan Perwakilan Rakyat		
3	Badan Pemeriksa Keuangan		
4	Mahkamah Agung		
5	Kejaksaan Agung		
6	Kementerian Sekretariat Negara		
7	Kementerian Dalam Negeri		
8	Kementerian Luar Negeri		
9	Kementerian Pertahanan		
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
11	Kementerian Keuangan		
12	Kementerian Pertanian		
13	Kementerian Perindustrian		
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		
15	Kementerian Perhubungan		
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
17	Kementerian Kesehatan		
18	Kementerian Agama		
19	Kementerian Ketenagakerjaan		
20	Kementerian Sosial		
21	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan		
23	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
26	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
27	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
28	Kementerian Pariwisata		
29	Kementerian Badan Usaha Milik Negara		
30	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi		
31	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia		
32	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		





No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga:		
33	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
34	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
35	Badan Intelijen Negara		
36	Lembaga Sandi Negara		
37	Dewan Ketahanan Nasional		
38	Badan Pusat Statistik		
39	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS		
40	Kementerian Agraria dan Tata Ruang		
41	Perpustakaan Nasional		
42	Kementerian Komunikasi dan Informatika		
43	Kepolisian Negara Republik Indonesia		
44	Badan Pengawas Obat dan Makanan		
45	Lembaga Ketahanan Nasional		
46	Badan Koordinasi Penanaman Modal		
47	Badan Narkotika Nasional		
48	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		
49	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional		
50	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia		
51	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika		
52	Komisi Pemilihan Umum		
53	Mahkamah Konstitusi		
54	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan		
55	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		
56	Badan Tenaga Nuklir Nasional		
57	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi		
58	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional		
59	Badan Informasi Geospasial		
60	Badan Standardisasi Nasional		
61	Badan Pengawas Tenaga Nuklir		
62	Lembaga Administrasi Negara		
63	Arsip Nasional Republik Indonesia		
64	Badan Kepegawaian Negara		
65	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan		
66	Kementerian Perdagangan		
67	Badan Ekonomi Kreatif		
68	Kementerian Pemuda dan Olahraga		
69	Komisi Pemberantasan Korupsi		

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga:		
70	Dewan Perwakilan Daerah		
71	Komisi Yudisial		
72	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		
73	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia		
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
75	Badan SAR Nasional		
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha		
77	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu		
78	Ombudsman RI		
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan		
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam		
81	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		
82	Sekretariat Kabinet		
83	Badan Pengawas Pemilihan Umum		
84	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia		
85	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia		
86	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PB Sabang		
87	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		

Yth.

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum		
	Kementerian Sekretariat Negara		
1	RS Cipto Mangunkusuma-Jakarta		
2	RS Fatmawati-Jakarta		
3	RS Persahabatan-Jakarta		
4	RS Jantung Harapan Kita-Jakarta		
5	RS Anak Bersalin Harapan Kita-Jakarta		
6	RS Kanker Dharmais-Jakarta		
7	RS Dr.Hasan Sadikin-Bandung		
8	RS Dr.Kariadi-Semarang		
9	RS Dr.Sardjito-Yogyakarta		
10	RS Sanglah-Denpasar		
11	RS Dr.Wahidin Sudirohusodo-Makassar		
12	RS Dr.M.Djamil-Padang		
13	RS Dr.Moh.Hoesin-Palembang		
14	RS Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta		
15	RS Orthopedi Prof Dr R Soeharso-Solo		
16	RSU Prof.Dr.R.Kandou, Manado		
17	RSU Dr.Soeradji Tirtonegoro,Klaten		
18	RS Paru Dr.Ario Wirawan, Salatiga		
19	RS Paru Dr.Rotinsulu - Bandung		

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum	
20	RS Mata Cicendo Bandung	
21	RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan,Jakarta	
22	RS Jiwa Dr Soeroyo Magelang	
23	RSU Dr.Marzoeki Mahdi Bogor	
24	RSU H. Adam Malik Medan	
25	RS Ketergantungan Obat , Jakarta	
26	RS Paru Goenawan Partowidigdo, Cisarua Bogor	
27	RS Stroke Nasional, Bk Tinggi	
28	RS Jiwa Radjiman W, Lawang	
29	Politeknik Kesehatan Jakarta III	
30	Politeknik Kesehatan Bandung	
31	Politeknik Kesehatan Medan	
32	Politeknik Kesehatan Semarang	
33	Politeknik Kesehatan Makassar	
34	Politeknik Kesehatan Jakarta II	
35	Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	
36	Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang	
37	Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang	
38	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	
39	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	
40	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	
41	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	
42	Politeknik Kesehatan Surabaya	
43	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta	
44	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar	
45	Balai Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	
46	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang	
47	Politeknik Kesehatan Surakarta	
48	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	
49	Politeknik Kesehatan Pontianak	
50	Politeknik Kesehatan Yogyakarta	
51	Politeknik Kesehatan Bengkulu	
52	RS Pusat Otak Nasional	
53	Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur	
54	Politeknik Kesehatan Denpasar	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
55	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	
	KEMENTERIAN KEUANGAN	
56	Pusat Investasi Pemerintah	
57	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	
58	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Jakarta	
59	Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit	
60	Lembaga Manajemen Aset Negara	
	KEMENTERIAN KOMINFO	
61	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika	

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum			
	KEMENTERIAN KUKM			
62	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Jakarta			
63	Lembaga Layanan Pemasaran-KUKM Jakarta			
	KEMENTERIAN KEHUTANAN			
64	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Jakarta			
	KEMENTERIAN RISTEK DIKTI			
65	Pusat Peragaan IPTEK Jakarta			
66	Universitas Negeri Malang			
67	Universitas Brawijaya Malang			
68	Universitas Negeri Semarang			
69	Universitas Negeri Surabaya			
70	Universitas Mulawarman Samarinda			
71	Universitas Sebelas Maret Surakarta			
72	Universitas Lampung			
73	Universitas Negeri Yogyakarta			
74	Universitas Negeri Gorontalo			
75	Universitas Bengkulu			
76	Universitas Sriwijaya			
77	Universitas Negeri Jakarta			
78	Universitas Andalas			
79	Universitas Jenderal Soedirman			
80	Universitas Haluoleo			
81	Universitas Riau			
82	Universitas Terbuka			
83	Politeknik Kesehatan Malang			
84	Universitas Udayana			
85	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa			
86	Politeknik Negeri Malang			
87	Universitas Tadulako			
88	Universitas Mataram			
89	Universitas Negeri Padang			
90	Universitas Pendidikan Ganesha			
91	Universitas Nusa Cendana			
92	Universitas Sam Ratulangi			
93	Universitas Negeri Jambi			
94	Universitas Tanjung Pura			
95	Universitas Syiah Kuala Aceh			
96	Universitas Negeri Medan			
97	Universitas Pattimura, Maluku			
98	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung			
99	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur			
100	Universitas Negeri Makassar			
	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI			
101	BPPT Enjiniring Jakarta			

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum		
	KEMENTERIAN AGAMA		
102	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta		
103	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah		
104	Universitas Islam Negeri Malang		
105	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung		
106	Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar		
107	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang		
108	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara		
109	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau		
110	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin		
111	IAIN Sunan Ampel Surabaya		
112	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten		
113	Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung		
114	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang		
115	Institut Agama Islam Negeri Mataram		
116	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh		
117	IAIN Imam Bonjol		
118	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi		
119	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal		
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		
120	Akademi Kimia Analisis Bogor		
121	Balai Besar Industri Agro		
122	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik		
123	Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri		
124	Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung		
	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA		
125	Pst Pengelolaan Kompl Gelora Bung Karno (PPK-GBK), Jakarta		
126	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran(PPKK), Jakarta		
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		
127	Balai Besar Pendd Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)		
128	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)		
129	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar		
130	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang		
131	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Tegal		
132	Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya		
133	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya		
134	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong		
135	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug		
136	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar		
137	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang		
138	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh		
139	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan		
140	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi		

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum			
141	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan			
142	Balai Kesehatan Penerbangan			
143	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta			
144	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong			
145	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang			
146	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali			
147	Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun			
148	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura			
149	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi			
150	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang			
151	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug			
152	Bandar Udara Juwata Tarakan			
153	Bandar Udara Sentani Jayapura			
154	Bandar Udara Fatmawati Bengkulu			
155	Bandar Udara Radin Inten II Lampung			
156	Bandar Udara Sis Al Jufri Palu			
157	Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo			
158	Bandar Udara A.S Hanandjoeddin di Tanjung Pandan			
159	Bandar Udara Kalimarau di Tanjung Redeb			
	KEMENTERIAN ESDM			
160	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"			
161	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara			
162	PPSDM Migas Cepu			
163	Politeknik Energi dan Mineral			
164	PPSDM Goelogi, Mineral dan Batubara			
165	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan			
166	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan konservasi Energi			
167	PPSDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi			
	KEMENTERIAN PERTANIAN			
168	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari			
169	Pusat Veterinaria Farma Surabaya			
	KEPOLISIAN RI			
170	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto			
171	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kediri			
172	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya			
173	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mappa Oudang Makassar			
174	Rumah Sakit Bhayangkara Semarang			
175	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang			
176	Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa			
177	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali			
178	Rumah Sakit Bhayangkara Bandung			
179	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Porong			
180	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin			

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum			
181	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu			
182	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Indramayu			
183	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Lumajang			
184	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk			
185	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tulungagung			
186	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palangkaraya			
187	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura			
188	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pontianak			
189	Rumah Sakit Bhayangkara Ambon			
190	Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung			
191	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Bojonegoro			
192	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Kupang			
193	RS Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek			
194	RS Bhayangkara Bondowoso			
195	RS Bhayangkara Kendari			
196	RS Bhayangkara Brimob Kelapa Dua			
197	RS Bhayangkara Palu			
198	RS Bhayangkara Tebing Tinggi			
199	RS Bhayangkara Mataram			
200	RS Bhayangkara Jambi			
201	RS Bhayangkara Balikpapan			
202	RS Bhayangkara Pekanbaru			
203	RS Bhayangkara Medan			
204	RS Bhayangkara Hasta brata Batu			
205	RS Bhayangkara Sespimma Lemdiklat polri			
206	RS Bhayangkara Manado			
207	RS Bhayangkara Padang			
208	RS Bhayangkara Yogyakarta			
	BP BATAM			
209	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam			
	BPKP SABANG			
210	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang			
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
211	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan			
	KEMENTERIAN PERTAHANAN			
212	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta			
213	RS TNI AL dr. Ramelan Surabaya			
214	RS TNI AU dr. Hardjolukito Yogyakarta			
215	RS TNI AD Tk. II Putri Hijau Medan			
216	RS TNI AD Tk.II Dustira Cimahi			
217	RS TNI AD Tk. III Ciremai Cirebon			
218	RS TNI AD Tk. II dr. Soepraoen Malang			
219	RS TNI AD Tk. II Pelamonia Makassar			

No.	Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum		
220	Rumkit Tk.II Udayana		
221	Rumkit Tk.II Kartika Husada		
222	Rumkit AD Tk.IV dr. Bratanata Unang		
223	Rumkit AU Tk.II dr. M. Salamun Bandung		
224	Rumkit AD Tk.II dr. Soedjono Magelang		
225	Rumkit AD Tk.II Wijayakusuma Purwokerto		
226	Rumkit Tk.II AK Gani, Palembang		
227	Rumkit Tk.II Hardjanto, Balikpapan		
228	Rumkit Tk.II Marthen Indey, Jayapura		
229	Rumkit Tk.II M. Ridwan M, Jakarta		
230	Rumkit Tk.II Iskandar Muda, Aceh		
231	Rumkit Tk.IV Salak, Bogor		
232	Rumkit Tk.IV Guntur, Garut		
233	RSAU Ernawan, Jakarta		
	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
234	Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan		
	KEMENTERIAN PARIWISATA		
235	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendahraan

Nomor : S - /PB/2020 Tanggal : Januari 2020

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2019

A. PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS

Pengguna petunjuk teknis ini adalah Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Satker BLU) pada pemerintah pusat.

Untuk Satker BLU yang terdampak pembentukan Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Satker BLU dimaksud tetap menyusun laporan keuangan BLU tahun 2019 menggunakan identitas entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019.

B. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLU tahun anggaran 2019 sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (PSAP 13) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, diperlukan petunjuk teknis bagi Satker BLU untuk menyusun laporan keuangan BLU tahun anggaran 2019 yang bertujuan umum.

Petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan BLU tahun 2019 yang bertujuan umum ini untuk mempertegas perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- 1. Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat.
- 2. Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit.
- 3. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) di Akhir Tahun Anggaran 2019.
- 4. Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra.
- 5. Penyajian dana kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
- 6. Penyajian komparasi laporan keuangan BLU tahun 2019 bagi Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
- 7. Langkah-langkah penyusunan laporan keuangan BLU tahun 2019 yang bertujuan umum menggunakan aplikasi.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI RESIPROKAL ATAS PENDAPATAN BLU DARI ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

Kebijakan akuntansi untuk transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat mengikuti ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2018 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk



Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal Antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI DANA TALANGAN BANK SEHUBUNGAN LIKUIDITAS KAS BLU RUMAH SAKIT

Transaksi pengadaan dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU merupakan transaksi pinjaman jangka pendek. Kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit terkait:

- 1. Transaksi perolehan dana talangan bank yang dilakukan BLU Rumah Sakit sehubungan kesulitan likuiditas kas dan setara kas BLU;
- 2. Pencatatan dana talangan bank yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan untuk penyelesaian tagihan dari *supplier* dan rekanan (termasuk hak pegawai apabila ada);
- 3. Pencatatan penyelesaian atau pengembalian dana talangan bank kepada lembaga keuangan perbankan;
- 4. Pencatatan belanja BLU yang dibiayai dari dana talangan bank (termasuk hak pegawai apabila ada);
- 5. Pencatatan kekurangan kas dan bank BLU dalam menyelesaikan tagihan belanja yang masih harus dibayar atas beban alokasi anggaran belanja BLU tahun anggaran berjalan; dan
- 6. Pencatatan piutang BPJS Kesehatan dan pelunasannya.

Kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit ini tidak digunakan sehubungan Satker BLU melakukan perolehan dana dari lembaga keuangan perbankan, namun tidak mengalami kesulitan likuiditas kas dan bank BLU maupun kas dan setara kas BLU, termasuk investasi jangka pendek apabila ada.

Selanjutnya petunjuk teknis kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit berpedoman pada ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1265/PB/2019 tanggal 7 November 2019 hal Petunjuk Teknis Dana Talangan untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU serta Kebijkan Akuntansinya.

E. PENCATATAN KONTRAK WANPRESTASI ATAU PENCAIRAN KLAIM JAMINAN KONTRAK YANG SUMBER DANANYA DARI DIPA RUPIAH MURNI (RM) DI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Kebijakan akuntansi atas kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2157/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI PENDAPATAN KERJA SAMA BLU YANG MENJADI BAGIAN HAK MITRA USAHA

Penyajian bagian hasil kerja sama mitra usaha dalam transaksi sesuai perjanjian kerja sama pada laporan keuangan BLU sebagai berikut:

- 1. Bagian pendapatan Satker BLU dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha sesuai perjanjian kerja sama, diakui sebagai Pendapatan Layanan BLU. Sedangkan penerimaan yang merupakan bagian pendapatan mitra usaha dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha tidak dapat diakui sebagai Pendapatan Layanan BLU. Selain itu, pembayaran atau penyerahan kas kepada mitra usaha atas bagian hasil pendapatannya tidak dapat diakui sebagai belanja/beban operasional BLU. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam paragraf 26 dan paragraf 82 PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.
- 2. Dalam hal secara teknis manajemen keuangan BLU terdapat penerimaan dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dan telah dilakukan pengesahan Pendapatan Layanan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU 2019 (termasuk bagian pendapatan mitra usaha ikut tersahkan), maka pada saat pembayaran atau penyerahan kas kepada mitra usaha atas bagian hasil pendapatannya diperlakukan sebagai transaksi Pengembalian Pendapatan Layanan BLU dan mengurangi realisasi Pendapatan Layanan BLU yang telah disahkan sebelumnya dan/atau diperhitungkan dalam periode pengesahan Pendapatan Layanan BLU berikutnya.
- 3. Dalam hal pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan terdapat identifikasi kas yang merupakan bagian pendapatan mitra usaha dan belum disahkan sebagai Pendapatan Layanan BLU serta belum diserahkan kepada mitra usaha, maka atas kas tersebut dicatat sebagai Kas Lainnya BLU dan diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga yang disajikan sebagai bagian dari pos kewajiban jangka pendek di Neraca. Pada tahun 2020, Satker BLU agar melakukan jurnal balik pada saat dana yang tercatat sebagai Kas Lainnya BLU telah diserahkan kepada mitra usaha, tanpa mengoreksi pengesahan/perhitungan pendapatan BLU tahun 2020.
- 4. Dalam hal pada ketentuan perjanjian kerja sama terdapat pengaturan penerimaan BLU dari mitra usaha berupa sewa ruangan dan/atau penggantian langganan daya, penerimaan tersebut diakui dan dicatat sebagai Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa LO berdasarkan asas bruto, dan secara periodik penerimaan tersebut dilakukan pengesahan sebagai realisasi Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa LRA.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN DANA KELOLAAN BLU YANG BERASAL DARI REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN BA BUN

Khusus untuk BLU yang memperoleh penugasan pengelolaan dana dan aset, di mana dana dan aset tersebut berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), penyajian investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU dari BUN pada Laporan Keuangan BLU tahun 2019 diatur sebagai berikut:

- Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset BA BUN 999.03 mencatat dan menyajikan nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 2. Nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU tahun 2019 dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03). Dengan demikian pastikan bahwa Satker/UAKPA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) telah melakukan penyesuaian yang sama terhadap nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya yang dicatat dan disajikan oleh Satker BLU pada Laporan Keuangan BLU.
- 3. Satker konsolidasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset BA BUN 999.03 melakukan eliminasi nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, utang jangka panjang BLU kepada BUN, transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya, serta akun terkait lainnya, dengan melakukan jurnal eliminasi secara manual sebagaimana diatur dalam surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 hal Petunjuk Teknis Koreksi atas Penyajian Transaksi Terkait Investasi Jangka Panjang BLU yang Bersumber dari Anggaran BUN pada LKKL 2017 Audited.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN KOMPARASI LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2019 BAGI SATKER YANG BARU PERTAMA KALI MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di tahun 2019, menyusun Laporan Keuangan BLU sesuai dengan PSAP 13.

Komponen Laporan Keuangan BLU tahun 2019 disajikan dengan membandingkan penyajian periode Laporan Keuangan BLU tahun 2019 dan periode Laporan Keuangan BLU tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LRA sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan secara komparasi dengan LRA tahun anggaran 2018 *audited* (sebelum menjadi Satker BLU).
- b. LPSAL sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2018.
- c. LO sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2018.
- d. LPE sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2018.
- e. Neraca per 31 Desember 2019 disajikan secara komparasi dengan Neraca per 31 Desember 2018 *audited*.
- f. LAK sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2018.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU MENGGUNAKAN APLIKASI

- 1. Tahap Penyiapan Aplikasi
 - Satker BLU yang menggunakan aplikasi SAIBA, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pastikan Aplikasi SAIBA sudah menggunakan versi 19.0.2 dengan Referensi versi 19.0.2 atau versi terakhir.
 - b. Pastikan Aplikasi SIMAK-BMN sudah menggunakan versi 19.1 dengan Referensi versi 19.1 atau versi terakhir.
 - c. Pastikan Aplikasi Persediaan minimal sudah menggunakan versi 19.0.1a atau versi terakhir.
 - d. Bagi Satker lama yang baru menerapkan pertama kali pola pengelolaan keuangan BLU di tahun 2019, pada tahap penyiapan aplikasi memastikan bahwa:
 - (1) Telah memilih status Satker "BLU" pada menu Registrasi *User* di Aplikasi SAIBA.
 - (2) Sudah melakukan proses konversi saldo awal pada menu Proses >> Konversi Saldo Awal (Khusus Satker BLU Baru) di Aplikasi SAIBA.
 - e. Bagi Satker baru yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU di tahun 2019, pada tahap penyiapan aplikasi perlu memastikan bahwa telah memilih Status Satker "BLU" pada menu Registrasi *User* di Aplikasi SAIBA.
 - f. Bagi Satker baru yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU di tahun 2019 yang menggunakan aplikasi SAKTI, pastikan Aplikasi SAKTI telah tersetup sebagai Satker BLU. *Setup* sebagai Satker BLU dilakukan oleh Administrator pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Ditjen Perbendahraan;
- 2. Tahap Proses Perekaman Data Realisasi dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja

- a. Pastikan seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas BLU yang memenuhi pengakuan pendapatan BLU dan belanja BLU tahun 2019 telah dilakukan pengesahan dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU.
- b. Pastikan telah dilakukan perekaman seluruh dokumen SP3B/SP2B-BLU ke dalam aplikasi SAIBA atau SAKTI.
- 3. Tahap Penyesuaian Akuntansi yang Diproses secara Otomatis oleh Sistem Aplikasi

Jurnal penyesuaian akuntansi yang diproses secara otomatis oleh sistem aplikasi meliputi penyajian:

- a. Nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan Barang Milik Negara yang memiliki karakteristik untuk disusutkan pada tahun berjalan di Laporan Keuangan.
- b. Nilai beban persediaan dan nilai persediaan akhir tahun 2019 di Laporan Keuangan.
- c. Nilai beban amortisasi dan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud pada tahun berjalan di Laporan Keuangan.

Bagi Satker BLU pengguna **aplikasi SAIBA**, jurnal penyesuaian akuntansi yang diproses secara otomatis oleh sistem aplikasi tersebut terjadi dengan memastikan:

- a. Data persediaan dari Aplikasi Persediaan telah dikirim ke Aplikasi SIMAK-BMN.
- b. Telah dilakukan proses penyusutan pada Aplikasi SIMAK-BMN.
- c. File kirim yang terbaru dari Aplikasi SIMAK-BMN telah diterima pada Aplikasi SAIBA.
- 4. Tahap Penyesuaian Akuntansi yang Diproses dari Posting Jurnal Manual Jurnal penyesuaian yang diproses dari posting jurnal manual diatur dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, dan dapat ditegaskan dan disederhanakan penjelasannya sebagai berikut:
 - (1) Kas Lainnya di BLU

Dalam hal pada akhir periode pelaporan terdapat saldo uang tunai dan/atau simpanan di bank yang dikelola oleh BLU yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU, seperti dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah murni dan/atau DIPA PNBP, Satker BLU melakukan perekaman saldo kas tersebut secara manual melalui aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut (disesuaikan dengan eksistensi transaksi):

D/K	Akun	Uraian
D	111826	Kas Lainnya di BLU
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU

D	111826	Kas Lainnya di BLU
K	212122	Utang Usaha
D	111826	Kas Lainnya di BLU
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
D	111826	Kas Lainnya di BLU
K	212192	Dana Pihak Ketiga Lainnya
D	111826	Kas Lainnya di BLU
K	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU
D	111826	Kas Lainnya di BLU
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Dalam hal kas-kas dimaksud sebelumnya telah tercatat pada akun selain akun Kas Lainnya di BLU agar dilakukan reklasifikasi dengan cara sebagai berikut:

a. Jurnal Pertama: Menghapus saldo akun selain akun Kas Lainnya di BLU:

D/K	Akun	Uraian
D	21xxxx	Utang
K	1118xx	<akun blu="" di="" kas="" lainnya="" selain=""></akun>

b. Jurnal Kedua: Mencatat akun Kas Lainnya di BLU:

D/K	Akun	Uraian
D	111826	Kas Lainnya di BLU
K	21xxxx	Utang(disesuaikan transaksinya)

Perekaman jurnal pertama dan jurnal kedua di atas harus direkam dengan masing-masing dua pasang jurnal karena akan berpengaruh pada penyajian LAK dan Neraca.

(2) Kas dan Bank BLU yang Teridentifikasi sebagai Transaksi *Outstanding Check* Kas dan Bank BLU teridentifikasi sebagai *outstanding check* ketika BLU melakukan transaksi pembayaran Belanja BLU tahun 2019 menggunakan fasilitas perbankan giro *check* yang ditandatangani persetujuannya di tahun 2019, serta telah dilakukan pengesahan Belanja BLU ke KPPN mitra kerja di tahun 2019. Namun demikian, berdasarkan rekonsiliasi Kas dan Bank BLU bahwa sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat giro *check* yang beredar (*outstanding check*) dan belum dicairkan oleh *supplier* (pihak ketiga).

Atas hal tersebut, terdapat selisih pencatatan Kas dan Bank BLU dengan saldo rekening koran bank yang teridentifikasi sebagai *outstanding check*. Selisih *outstanding check* tersebut dilakukan pencatatan jurnal manual melalui **aplikasi SAIBA atau SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	111826	Kas Lainnya di BLU
K	212192	Dana Pihak Ketiga Lainnya

Selanjutnya, pada periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik atas jurnal manual penyesuaian di atas dengan memperhatikan mutasi rekening atas pencairan *outstanding check* oleh *supplier* (pihak ketiga).

(3) Kas dan Bank BLU yang Teridentifikasi sebagai Transaksi Pembentukan Bank Garansi

Saldo Neraca atas Kas dan Bank BLU per 31 Desember 2019 yang teridentifikasi dalam bentuk Bank Garansi dilakukan jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Dana yang Dijaminkan – BLU melalui **aplikasi SAIBA atau SAKTI** sebagai berikut:

D	/K	Akun	Uraian
П	О	111912	Dana yang akan Dijaminkan - BLU
	K	111911	Kas dan Bank BLU

Reklasifikasi di atas akan menyebabkan selisih saldo Kas dan Bank BLU antara Satker BLU dengan KPPN. Untuk kebutuhan rekonsiliasi bulanan atas Kas dan Bank BLU sebagaimana amanat PMK Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satker BLU menjelaskan selisih tersebut secara memadai.

- (4) Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Setara Kas BLU dan Investasi Jangka Pendek BLU (Deposito)
 - a. Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Setara Kas BLU Jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Setara Kas BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek sampai dengan 3 (tiga) bulan melalui aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun		Uraian
D	111921	Surat Berharga - BLU	
K	111911	Kas dan Bank BLU	
D	111929	Setara Kas Lainnya - BLU	
K	111911	Kas dan Bank BLU	

Akun Setara Kas Lainnya – BLU digunakan untuk mencatat Setara Kas Lainnya – BLU yang antara lain berupa Deposito dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.

b. Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Investasi Jangka Pendek BLU Dalam hal BLU memiliki saldo Kas dan Bank BLU yang diinvestasikan dalam investasi jangka pendek, dilakukan perekaman jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Investasi Jangka Pendek BLU melalui aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank
		BLU Yang Sudah Disahkan
K	111911	Kas dan Bank BLU

Dalam hal terdapat pelepasan investasi (divestasi) jangka pendek BLU dilakukan perekaman jurnal manual reklasifikasi dari Investasi Jangka Pendek BLU menjadi Kas dan Bank BLU melalui **aplikasi SAIBA atau SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	111911	Kas dan Bank BLU
K	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan

(5) Koreksi Nilai Kas BLU khusus untuk pembentukan BLU baru Dalam hal pada saat pembentukan awal BLU memiliki saldo awal, pencatatan saldo awal pada **Aplikasi SAIBA atau SAKTI** dilakukan dengan jurnal manual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	111911	Kas dan Bank BLU
K	311315	Penyesuaian SAL BLU

Selain itu, perlu diajukan Memo Penyesuaian koreksi saldo awal kas BLU dimaksud kepada KPPN mitra kerja.

(6) Hibah Barang dan/atau Jasa pada BLU

Pendapatan Hibah BLU dalam bentuk barang dan/atau jasa tidak dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja. Pendapatan Hibah BLU dalam bentuk barang dan/atau jasa diakui pada saat berita acara serah terima (BAST) barang/jasa.

a. Pencatatan Pendapatan Hibah BLU dalam bentuk jasa dan/atau barang ekstrakomptabel dilakukan dengan perekaman jurnal manual pada aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	525XXX	Beban BLU (beban jasa / beban ekstrakomptabel)
K	42423X	Pendapatan Hibah Terikat – Barang/Jasa
D	525XXX	Beban BLU (beban jasa / beban ekstrakomptabel)
K	42424X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang/Jasa

b. Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dari hibah BLU direkam pada aplikasi SIMAK-BMN atau Persediaan dan menghasilkan jurnal otomatis yang akan dikirim ke **aplikasi SAIBA** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister

c. Atas penerimaan jurnal dari Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan di atas, dilakukan perekaman jurnal manual untuk mengakui pendapatan hibah barang BLU pada **aplikasi SAIBA** dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister
K	42423X	Pendapatan Hibah Terikat – Barang/Jasa
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister
K	42424X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang/Jasa

d. Untuk **Satker BLU pengguna SAKTI**, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dari hibah BLU direkam pada modul aset dan jurnal otomasi yang terbentuk sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya
K	42423X	Pendapatan Hibah Terikat – Barang/Jasa
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya
K	42424X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang/Jasa

(7) Koreksi Akuntansi atas Aset yang Belum Diregister yang Disebabkan oleh Ketidaksesuaian Akun Pengesahan Belanja BLU untuk Satker BLU yang menggunakan Aplikasi SAIBA

Kesalahan penggunaan akun pengesahan belanja BLU yang tidak tepat dapat menyebabkan timbulnya aset belum diregister di dalam Neraca yang tidak bisa tereliminasi secara otomatis. Contoh:

- a. Akun belanja barang BLU yang menghasilkan persediaan namun digunakan bukan untuk pengesahan belanja barang persediaan.
- b. Akun belanja modal BLU namun digunakan bukan untuk pengesahan atas perolehan atau pengembangan BMN dengan harga satuan memenuhi nilai minimum kapitalisasi.
- c. Akun belanja BLU yang seharusnya tidak menghasilkan BMN tetapi digunakan untuk pengesahan atas perolehan/pengembangan BMN;
- d. Kesalahan penggunaan akun belanja modal BLU, misalnya pengadaan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud disahkan dengan menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan BLU;
- e. Kesalahan penggunaan akun belanja modal BLU yang digunakan untuk pengesahan perolehan barang persediaan; dan
- f. Akun belanja persediaan BLU yang digunakan untuk mengesahkan perolehan aset tetap/aset lainnya.

Terhadap ketidaksesuaian ini seharusnya dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja BLU sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi output yang dihasilkan.

Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan Tahun 2019 dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja BLU, agar tidak terjadi salah saji di dalam Laporan Keuangan perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari Neraca.

BLU mengungkapkan secara memadai alasan/pertimbangan manajemen tidak melakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:

a. Akun belanja barang BLU yang menghasilkan persediaan namun digunakan bukan untuk pengesahan belanja barang persediaan

Pada saat dilakukan pengesahan belanja barang BLU yang menghasilkan persediaan di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D	52512x	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU	D	117911	Persediaan yang belum Diregister	
K	115631	Piutang dari Kas BLU	K	111911	Kas dan Bank BLU	

Sehubungan pengesahan ini tidak digunakan untuk pengesahan perolehan persediaan namun untuk pengesahan beban yang lain, maka jurnal ini tidak dapat tereliminasi secara otomatis.

Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja, maka dilakukan jurnal koreksi pada buku besar akrual dengan mendebet beban yang seharusnya dan mengkredit persediaan yang belum diregister secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	525xxx	Beban BLU
K	117911	Persediaan yang belum Diregister

Contoh:

Satker BLU Amanah terlanjur merevisi seluruh akun 525112 ke akun 525121 termasuk di dalamnya anggaran untuk pengadaan Seminar Kit (untuk habis pakai) dan sampai akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi (perbaikan) lagi, sehingga Sakter BLU Amanah mengesahkan pengadaan Seminar Kit (untuk habis pakai) menggunakan akun 525121 senilai Rp10 juta. Pada saat pencatatan realisasi belanja di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Kas				Bu	ku Besar Akrual	
D	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	10 jt	D	117911	Persediaan yang belum Diregister	10 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	10 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	10 jt

Sehubungan tidak ada perolehan persediaan yang direkam di aplikasi Persediaan, maka akun Persediaan yang Belum Diregister tidak bisa terleminasi secara otomatis.

Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan belanja. Dilakukan jurnal koreksi akuntansi untuk mengeliminasi Persediaan yang Belum Diregister dan mencatat beban yang seharusnya secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	525112	Beban Barang	10 juta
K	117911	Persediaan yang belum Diregister	10 juta

 b. Akun belanja modal BLU namun digunakan bukan untuk pengesahan atas perolehan atau pengembangan BMN dengan harga satuan memenuhi nilai minimum kapitalisasi

Pada saat dilakukan pencatatan pengesahan belanja modal BLU di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D	537xxx	Belanja Modal BLU	D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	
K	115631	Piutang dari Kas BLU	K	111911	Kas dan Bank BLU	

Sehubungan dengan pengesahan belanja modal BLU ini seharusnya tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap/Aset Lainnya melainkan menimbulkan beban atau menghasilkan BMN ekstrakomptabel, maka tidak ada jurnal hasil perekaman dari aplikasi SIMAK-BMN yang dikirim ke Aplikasi SAIBA, sehingga jurnal di atas tidak dapat tereliminasi secara otomatis.

Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja BLU, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA dengan mendebet beban yang seharusnya dan mengkredit Aset Tetap yang Belum Diregister/ Aset Lainnya yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Akun Uraian			
D	595xxx Beban Aset Ekstrakomptabel			
K	13xxxx/16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister		

Contoh:

 Sakter BLU Amanah melakukan kegiatan pemeliharaan gedung menggunakan akun 537113 senilai Rp 20 juta. Pada saat pencatatan pengesahan belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual				
D	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	20 jt	D	133211	Gedung dan Bangunan yang belum Diregister	20 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	20 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	20 jt

Sehubungan tidak ada peningkatan nilai gedung dan bangunan yang direkam di aplikasi SIMAK-BMN, maka akun Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister tidak bisa tereliminasi secara otomatis dari Neraca.

Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja BLU, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah		
D	595113	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan	20 juta		
		Bangunan			
K	133211	Gedung dan Bangunan yang belum Diregister 20 juta			

2. Sakter BLU Amanah melakukan kegiatan pembelian kursi sebanyak 100 buah @ Rp750.000,00 menggunakan akun 537112 senilai Rp75 juta. Pada saat pencatatan pengesahan belanja di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Kas				Ві	ıku Besar Akrual	
D	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	75 jt	D	132211	Peralatan dan Mesin yang belum Diregister	75 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	75 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	75 jt

Pembelian kursi tersebut direkam di Aplikasi SIMAK-BMN yang secara otomatis akan dimasukkan ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel (karena nilai satuannya di bawah minimum kapitalisasi) dan tidak ada jurnal yang dikirim ke Aplikasi SAIBA, maka akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister tidak bisa tereliminasi secara otomatis dari Neraca. Pengesahan atas pembelian kursi di atas seharusnya menggunakan akun belanja barang BLU. Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	75 juta
K	132211	Peralatan dan Mesin yang belum Diregister	75 juta

c. Akun pengesahan belanja BLU yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya tetapi digunakan untuk pengesahan atas perolehan/pengembangan persediaan/aset tetap/aset lainnya

Pada saat dilakukan pencatatan atas pengesahan belanja BLU di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D	525xxx	Belanja BLU	D	525xxx	Beban BLU
K	115631	Piutang dari Kas BLU	K	111911	Kas dan Bank BLU

Sehubungan pengeluaran tersebut ternyata menghasilkan aset berupa persediaan/aset tetap/aset lainnya, maka dilakukan perekaman perolehan persediaan/aset tetap/aset lainnya di Aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN dan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian		
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya		
K	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister		

Pada saat jurnal tersebut di terima di Aplikasi SAIBA akan memunculkan Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister bersaldo minus (kredit). Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen

pengesahan realisasi belanja BLU, maka dilakukan jurnal koreksi pada buku besar akrual dengan mendebet Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister dan beban terkait pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister
K	525xxx	Beban BLU

Contoh:

Sakter BLU Amanah membeli Alat Tulis Kantor yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari kantor menggunakan akun 525112 senilai Rp 1 juta. Pada saat pencatatan atas pengesahan realisasi belanja BLU di Aplikasi SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas					Bul	ku Besar Akrual	
D	525112	Belanja Barang	1 jt	D	525112	Beban Barang	1 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	1 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	1 jt

Pada saat persediaan Alat Tulis Kantor direkam di Aplikasi Persediaan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	117111	Barang Konsumsi	1 juta
K	117911	Persediaan yang belum Diregister	1 juta

Pada saat jurnal ini diterima di Aplikasi SAIBA akan memunculkan Persediaan yang belum Diregister bersaldo minus (kredit). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	117911	Persediaan yang belum Diregister	1 juta
K	525112	Beban Barang	1 juta

d. Kesalahan penggunaan akun belanja modal BLU, misalnya pengadaan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud disahkan dengan menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan BLU

Pada saat pencatatan atas pengesahan realisasi belanja modal gedung dan Bangunan di Aplikasi SAIBA akan muncul jurnal sebagai berikut:

		Buku Besar Kas	Buku Besar Akrual		
D	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	D	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister
K	115631	Piutang dari Kas BLU	K	111911	Kas dan Bank BLU

Sehubungan transaksi ini substansinya pencatatan peralatan dan mesin, maka diinput pada Aplikasi SIMAK-BMN sebagai Peralatan dan Mesin dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	132111	Peralatan dan Mesin
K	132211	Peralatan Mesin yang Belum Diregister

Apabila jurnal dari SIMAK-BMN tersebut telah diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada posisi debet (positif) dan akun Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada posisi kredit (minus). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister
K	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Contoh:

Satker BLU Amanah mengadakan kegiatan pembangunan Gedung menggunakan akun 537113 senilai Rp 6 Miliar. Ternyata termasuk di dalamnya terdapat pembelian Peralatan dan Mesin berupa meubelair senilai Rp1 Miliar. Pada saat pencatatan atas pengesahan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Aplikasi SAIBA akan muncul jurnal akrual sebagai berikut:

Buku Besar Kas				Buku Besar Akrual			
D	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	6 M	D	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	6 M
K	115631	Piutang dari Kas BLU	6 M	K	111911	Kas dan Bank BLU	6 M

Sehubungan atas transaksi ini menghasilkan Gedung dan Bangunan dan juga Peralatan dan Mesin, maka diinput pada Aplikasi SIMAK-BMN sebagai Gedung dan Bangunan Rp5 Miliar dan Peralatan dan Mesin Rp1 Miliar. Secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Jurnal pertama:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	132111	Peralatan dan Mesin	1 Miliar
K	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	1 Miliar

Jurnal kedua:

	D/K	Akun	Uraian	Jumlah
Ī	D	133111	Gedung dan Bangunan	5 Miliar
ſ	K	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	5 Miliar

Apabila jurnal dari Aplikasi SIMAK-BMN tersebut telah diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister pada posisi debet (positif) sebesar Rp1 Miliar dan akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp1 Miliar.

Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	D 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister		1 Miliar
K	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	1 Miliar

e. Kesalahan penggunaan akun belanja modal BLU yang digunakan untuk pengesahan perolehan barang persediaan

Pada saat pencatatan pengesahan realisasi belanja modal di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D	537xxx	Belanja Modal BLU	D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister
K	115631	Piutang dari Kas BLU	K	111911	Kas dan Bank BLU

Sehubungan pengeluaran ini ternyata menghasilkan barang persediaan, maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan persediaan di aplikasi persediaan. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	D/K	Akun	Uraian
ſ	D	117xxx	Persediaan xxx
	K	117911	Persediaan yang Belum Diregister

Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA akan menyebabkan Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister bersaldo positif dan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo minus. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Ī	D/K	Akun	Uraian
ſ	D	117911	Persediaan yang Belum Diregister
	K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister

Contoh:

Satker BLU Amanah melakukan kegiatan pengadaan peralatan komputer senilai Rp20 juta menggunakan akun 537112 termasuk didalamnya terdapat pembelian toner printer senilai Rp2 Juta. Pada saat pencatatan realisasi belanja di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas	Buku Besar Akrual
----------------	-------------------

D	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	20 jt	D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	20 jt
Κ	115631	Piutang dari Kas BLU	20 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	20 jt

Peralatan dan mesin senilai 18 juta diinput pada Aplikasi SIMAK-BMN dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	D/K	Akun	Uraian	Jumlah
=	D	132111	Peralatan dan Mesin	18 juta
Ī	K	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	18 juta

Sedangkan persediaan senilai Rp2 juta direkam pada aplikasi Persediaan dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/	'K	Akun	Uraian	Jumlah
D)	117111	Barang Konsumsi	2 juta
K	(117911	Persediaan yang Belum Diregister	2 juta

Apabila jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun peralatan dan Mesin yang belum diregister pada posisi debet (positif) sebesar Rp2 juta dan akun Persediaan yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp2 juta. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	2 juta
K	K 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister		2 juta

f. Akun belanja persediaan BLU yang digunakan untuk mengesahkan perolehan aset tetap/aset lainnya

Pada saat pencatatan realisasi belanja persediaan di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:

		Buku Besar Kas	Buku Besar Akrual		
D	52512x	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU	D	117911	Persediaan yang Belum Diregister
K	115631	Piutang dari Kas BLU	K	111911	Kas dan Bank BLU

Sehubungan pengeluaran ini ternyata menghasilkan aset tetap/aset lainnya, maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan aset tetap/aset lainnya di aplikasi SIMAK-BMN. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	13xxxx/16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya
K	13xxxx/16xxxx	Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA akan menyebabkan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo debet (positif) dan Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister bersaldo kredit (minus). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	13xxxx/16xxxx	Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister

Contoh:

Satker BLU Amanah melakukan kegiatan pengadaan external harddisk senilai Rp5 juta menggunakan akun 525129. Pada saat pencatatan pengesahan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

		Buku Besar Kas		Buku Besar Akrual			
D	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	5 jt	D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	5 jt
K	115631	Piutang dari Kas BLU	5 jt	K	111911	Kas dan Bank BLU	5 jt

Sehubungan pengeluaran ini ternyata untuk belanja peralatan dan mesin (*external harddisk*), maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan peralatan dan mesin di Aplikasi SIMAK-BMN. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	132111	Peralatan dan Mesin	5 juta
K	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	5 juta

Apabila jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Persediaan yang belum Diregister pada posisi debet (positif) sebesar Rp5 juta dan akun Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp5 juta. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen pengesahan realisasi belanja BLU, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Jumlah
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	5 juta
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	5 juta

(8) Koreksi Akuntansi atas Aset yang Belum Diregister yang Disebabkan oleh Ketidaksesuaian Akun Pengesahan Belanja BLU untuk Satker BLU yang menggunakan Aplikasi SAKTI

Pada satker pengguna Aplikasi SAKTI, ketidaktepatan penggunaan akun belanja pada prinsipnya juga wajib ditindaklanjuti dengan revisi

anggaran/ralat dokumen realisasi belanja sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi *output* yang dihasilkan.

Namun demikian, apabila sampai dengan tanggal pelaporan tidak lagi dimungkinkan untuk melakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, perlakuan atas ketidaktepatan penggunaan akun pada Aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut:

No	Ketidaktepatan Akun	Keterangan	Jurnal Penyesuaian
1	Ketidaktepatan penggunaan akun belanja modal (misalnya akun belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk perolehan peralatan dan mesin).	Aplikasi SAKTI hanya menggunakan satu akun Aset yang Belum Diregister sehingga tidak terjadi selisih pencatatan.	Tidak diperlukan
2	Ketidaktepatan penggunaan akun belanja modal untuk perolehan aset ekstrakomptabel.	Ketika satker tidak memilih BMN intrakomptabel, Aplikasi SAKTI secara otomatis membentuk jurnal dengan akun Beban Aset Ekstrakomptabel sehingga tidak terjadi selisih pencatatan.	Tidak diperlukan
3	Ketidaktepatan penggunaan akun belanja barang non persediaan untuk perolehan persediaan.	Akun Persediaan yang Belum Diregister terbentuk pada saat mencatat penerimaan dan pendetailan persediaan sehingga tidak terjadi selisih pencatatan.	Tidak diperlukan
4	Ketidaktepatan penggunaan akun belanja persediaan untuk perolehan non persediaan.	Terjadi selisih pencatatan berupa timbulnya akun Persediaan yang Belum Diregister.	Diperlukan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi akun Persediaan yang Belum Diregister dan mencatat akun Beban yang seharusnya.

Ketidaktepatan penggunaan akun pada Aplikasi SAKTI dapat dimonitor melalui Aplikasi MONSAKTI dan menjadi bahan evaluasi bagi satker.

- (9) Dana Kelolaan BLU dari BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)
 - a. Penambahan Dana Kelolaan BLU yang diterima tahun 2019 sesuai dengan SPM/SP2D Pembiayaan Investasi Pemerintah tahun 2019 dilakukan perekaman jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian			
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan			
K	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN			

- b. Transaksi setelah perolehan Dana Kelolaan BLU dari BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) yang diperoleh baik di tahun 2019 maupun tahun sebelumnya, penggunaan dana kelolaan BLU sesuai dengan penugasan BLU dan penyajian nilai wajar dana kelolaan BLU dan/atau nilai wajar investasi atau aset lainnya yang dibiayai dari BA BUN Investasi Pemerintah, dicatat dan disajikan mengikuti perlakuan akuntansi dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
- c. Dalam hal terdapat saldo Dana Kelolaan BLU dari BA BUN 999.03 yang belum digulirkan/diinvestasikan yang berupa deposito berjangka lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak dilakukan reklasifikasi Dana Kelolaan BLU menjadi Investasi Jangka Pendek (deposito) di Neraca.
- (10) Aset Kelolaan BUN dan Akumulasi Penyusutannya

Dalam hal BLU Pengelola Aset (BLU LMAN) menerima BMN dalam rangka penugasan pengelolaan investasi dari BUN di tahun berjalan, perlakuan akuntansi dan jurnalnya mengikuti Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset Bendahara Umum Negara oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

- (11) Utang kepada Pihak Ketiga BLU dan Belanja yang Masih Harus Dibayar
 - d. Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Dalam hal BLU memiliki utang kepada Pihak Ketiga BLU atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana DIPA PNBP secara Non Tunai di tahun berjalan 2019, maka dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian		
D	525xxx	Beban Barang BLU		
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU		

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Dalam hal terdapat pengadan aset dengan sumber dana DIPA PNBP yang sudah diterima dan telah diinput pada Aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN tetapi belum dibayar maka diakui sebagai kewajiban, dan Satker BLU melakukan jurnal manual sebagai berikut:

D/ł	Akun		Uraia	n		
D	117911/13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Diregister	tetap/Aset	Lainnya	yang	Belum
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU				

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

e. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Dalam hal BLU memiliki utang kepada Pihak Ketiga BLU atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM) secara Non Tunai tahun berjalan 2019, maka dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian		
D	5xxxxx/117911 Beban/ Persediaan yang Belum Diregister			
K	21211x	Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar		

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Dalam hal terdapat belanja modal dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM) di mana asetnya sudah diterima tetapi belum dibayar maka diakui sebagai kewajiban, dan Satker BLU melakukan jurnal manual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	13xxxx/16xxxx Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	
K	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

(12) Pendapatan Diterima di Muka BLU

Pendapatan diterima di muka BLU merupakan pendapatan BLU yang sudah diterima di rekening kas BLU, baik yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan, tetapi belum menjadi hak BLU sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BLU untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

Pencatatan pendapatan diterima di muka dilakukan dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian		
D	424xxx	Pendapatan BLU		
K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU		

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

(13) Pendapatan Accrued (Pendapatan yang Masih Harus Diterima)

Pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan BLU yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak BLU tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Dokumen yang dapat digunakan dalam pengakuan pendapatan ini seperti surat perjanjian, transaksi bisnis berjangka, dan lain-lain. Jika terdapat dokumen tersebut dan diketahui atau dapat dihitung nilainya, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian			
D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima			
K	424xxx	Pendapatan BLU			

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

(14) Penghentian Pengakuan Piutang pada Satker BLU

Secara umum penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan). Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dapat dilakukan dengan penghapusan, baik penghapusbukuan (*write off*) maupun penghapustagihan (*write down*). Penghentian pengakuan piutang dengan pelunasan dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

a. Pelunasan Piutang Tahun Berjalan yang Belum Dicadangkan Penyisihan Piutang Tak Tertagihnya

Pelunasan piutang dilakukan dengan pengesahan pendapatan BLU dengan dokumen SP3B/SP2B BLU. Perekaman dokumen SP3B/SP2B BLU akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D 219721 Utang Kepada kas BLU		D	111911	Kas dan Bank BLU	
K	424xxx	Pendapatan BLU	K	424xxx	Pendapatan BLU

Setelah perekaman dokumen SP3B/SP2B BLU, Satker BLU melakukan penyesuaian nilai piutang (berkurang) dengan merekam jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	424xxx	Pendapatan BLU
K	1157xx	Piutang dari kegiatan Operasional BLU
D	424xxx	Pendapatan BLU
K	1158xx	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

b. Pelunasan Piutang yang Telah Dicadangkan Penyisihan Piutang Tak Tertagihnya

Apabila piutang telah dicadangkan penyisihan tak tertagihnya kemudian diterima pelunasannya, maka pengesahan pendapatan dari pelunasan tersebut berdasarkan SP3B/SP2B BLU membentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Kas			Buku Besar Akrual		
D	D 219721 Utang Kepada kas BLU		D	111911	Kas dan Bank BLU	
K	424xxx	Pendapatan BLU	K	424xxx	Pendapatan BLU	

Setelah perekaman dokumen SP3B/SP2B BLU, Satker BLU melakukan penyesuaian nilai piutang (berkurang) dengan merekam jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	424xxx	Pendapatan BLU
K	1157xx	Piutang dari kegiatan Operasional BLU
D	424xxx	Pendapatan BLU
K	1158xx	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Pada akhir periode pelaporan, BLU melakukan penyesuaian dengan jurnal manual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian
D	1166xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
K	5946xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
D	1167xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
K	5947xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Non Operasional BLU

- 5. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan BLU
 - a. Pastikan rekonsiliasi data melalui Aplikasi e-Rekon&LK telah selesai dilakukan yang ditandai dengan BAR siap download.
 - b. Satker BLU menyusun Laporan Keuangan BLU tahun 2019 berdasarkan cetakan laporan dari **Aplikasi SAIBA atau SAKTI** yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 6) Laporan Arus Kas (LAK).
 - c. Memastikan bahwa satker BLU melakukan telaah laporan keuangan yang berpedoman pada Pedoman Telaah Laporan Keuangan BLU (format telaah terlampir).
 - d. Memastikan bahwa Laporan Keuangan telah direviu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) guna menjamin keakuratan penyajiannya.

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S - /PB/2020 Tanggal : Januari 2020

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN SATKER BADAN LAYANAN UMUM PERIODE TAHUN 2019

: (.....).....

Kode dan Nama K/L

Ko	de dan Nama Es1 : ()			
Ко	de dan Nama Satker : ()			
	Objek Penelaahan	Kond	lisi LK	Seharusnya
Ве	ri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A	. N		
Bile	a terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
	KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Ke	engkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Pernyataan Telah Direviu			Ada
2.	Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
3.	LRA face			Ada
4.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih			Ada
5.	Laporan Arus Kas			Ada
6.	Neraca			Ada
8.	Laporan Operasional			Ada
9.	Laporan Perubahan Ekuitas			Ada
10	Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
11	Cetakan LRA, LO, LPE & Neraca Face versi Non BLU (cetak dari aplikasi e-Rekon&LK)			Ada
	PENGGUNAAN APLIKASI			
		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir?			Ya
	Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule penyajian laporan keuangan.	yang be	rdampak	pada
	KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTAN	1SI		
Pe	ngecekan Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah di Neraca nilai Aset = nilai Kewajiban + nilai Ekuitas? Lakukan pengecekan di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"			Sama
2.	Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
3.	Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca			Sama
	Apabila ada yang tidak sama, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi atau sehingga tidak terkalkulasi	ı tidak te	rmapping	dalam laporan
	NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pe	ngecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? Cek juga di e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Akun Non Ref"			Tidak
2.	Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", <i>kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" & "Kas & Bank BLU Belum Disahkan"</i>			Tidak

Page 1 of 7 *Ver.02/01/2020*

TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
Akun Kas Setara Kas (111xxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Akun 111xxx pada BLU hanya boleh 11161x, 111826, 11191x dan 111929. Apakah iya?			Ya
Apakah Deposito s.d. 3 bulan menggunakan 111929 dan Deposito diatas 3 bulan s.d. 12 Bulan			
menggunakan 113311?			Ya
Akun "Belum diregister"	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Belum Diregister"?			Tidak
Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada			
Akun dengan "frasa BLU"	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah akun Persediaan, Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi, dan Beban terkait Aset dengan frasa BLU?			Tidak
Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan,	/Aset "Bl	LU"	
Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan (111914)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo pada akun 111914?			Tidak
Pada LK Tahunan seharusnya tidak ada, jika ada, segera lakukan pengesahan melalui SP3B-BLU		<u> </u>	
Akun Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan (165111)	Ya	Tidak	Seharusnya
	14	Haak	
Adakah Akun Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan (165111)			Ya/Tidak
Apakah dana tersebut berasal dari BA BUN 999.03			Ya
Akun Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan (165111) hanya boleh ada pada BLU 999.03. Jika terdapat saldo akun tersebut pada BLU selain BLU Pengelola Dana dari BA BUN 999.03	_		dari BA BUN
Hibah Langsung BLU tidak melalui pengesahan SP2HL/MPHL-BJS	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah 111822 Kas Lainnya di KL dari Hibah?			Tidak
2. Adakah 111827 Kas Lainnya di KL dari Hibah Yang Belum Disahkan?			Tidak
3. Adakah 218211 Hibah Langsung Yang Belum Disahkan?			Tidak
4. Adakah 391131 Pengesahan Hibah Langsung?			Tidak
5. Adakah 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung?			Tidak
Utang Pajak Bendahara yang belum disetor	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah 219962 atau 219963 atau 219964?			Tidak
Apabila ada pajak yang belum disetor ke Kas Negara, wajib menggunakan akun 219961	Т	1 1	
Akun Ekuitas (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
Akun Perpajakan (41xxxx) dan Hibah (43xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?			Tidak
2. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah) ?			Tidak
Akun Pendapatan PNBP Lainnya (423xxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx (Akun 423xxx tidak boleh ada)			Tidak
Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak
2. Adakah akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
3. Adakah akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
4. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
5. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak
8. Adakah akun 425914/5/6/7/8/9 Penerimaan Kembali Belanja Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Bansos/Lain-lain/Transfer TAYL			Tidak
9. Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)			Tidak

Page 2 of 7 *Ver.02/01/2020*

0. Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)			Tidak
1. Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)			Tidak
2. Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)			Tidak
engecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Rumah Sakit)			Tidak
Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya? (seharusnya 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))			Tidak
ransfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211	Ya	Tidak	Seharusnya
. Nilai selisih TK/TM (excel e-Rekon&LK) secara Absolut	Rp.		
dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apaka manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb?		jelasan se	cara
Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp.	Tidal.	Cabamaaa
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	кр. Ya	Tidak	Seharusnya
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) . Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		Tidak	Seharusnya Ya/Tidak
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Tidak	
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)? Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		Tidak Tidak	Ya/Tidak
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)? Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	Ya		Ya/Tidak Ya/Tidak
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)? Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? elaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya		Ya/Tidak Ya/Tidak
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)? Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? elaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan I. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Ya Ya Rp.		Ya/Tidak Ya/Tidak
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)? Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? elaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan J. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511 2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	Ya Ya Rp. Rp.		Ya/Tidak Ya/Tidak
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)? Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? elaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan I. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511 2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311 3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	Ya Ya Rp. Rp. Rp.	Tidak	Ya/Tidak Ya/Tidak Seharusnya Tidak
elaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)? Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? elaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan L. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511 2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311 3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311 4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	Ya Ya Rp. Rp. Rp. Rp.	Tidak Tidak	Ya/Tidak Ya/Tidak Seharusnya Tidak ng per satker

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah (Kecuali Pendapatan Hibah BLU)			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
2. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang **dapat** bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).

k	Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
Ĺ	Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang			Vo
1	(Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

Page 3 of 7 *ver.02/01/2020*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan akun tertentu	Ada/Ya	Tidak	Seharusnya	
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?			Tidak	
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?			Ya	
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama	
Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti melakukan jurnal menggunakan akun 391111 (perbaiki)				
Pengungkapan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya	
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119	'			
Apakah telah dibuat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya	
Contoh 1: Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp151.500.000 dise senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp51.500.000 dengan dokumen s Contoh 2: Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh ad	umber BAS	Т		
senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehing berjalan.	ga dilakuka	an dikore	ksi di tahun	
NERACA				
	Ya	Tidak	Seharusnya	
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)			Ya	
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?			Tidak	
3. Dari kolom perbandingan antara Tahunan 2019 dengan Audited 2018, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?			Tidak	
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2018, Apakah demikian?			Ya	
Apakah seluruh Kas telah dicatat di Neraca? Tidak hanya Kas dan Bank BLU saja? Bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Saldo Kas pada Rekening Dana Kelolaan.			Ya	
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawab sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"	an awal "T	IDAK", m	aka jawaban	
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya	
Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya	
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya	
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak	
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada	
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada	
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya	
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak	
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada	
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya	
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak	
- Beban Persediaan (di LO)			Ada	
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)			Ada	
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)			Ada	
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya	
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak	
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada	
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada	

Page 4 of 7 *Ver.02/01/2020*

Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?			Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LK dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Tahunan 2018 ?			Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Inte	rnal Sawa	יווי	
Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi,			
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (<i>Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN"</i>)			Tidak
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih			Tidak
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (<i>Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN"</i>)	Ada	Tidak	
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (<i>Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN"</i>)	Ada	Tidak	Tidak Seharusnya Tidak
Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (<i>Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN"</i>) LAPORAN REALISASI ANGGARAN	Ada	Tidak	Seharusnya
Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")	Ada	Tidak	Seharusnya Tidak
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") 2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?	Ada	Tidak	Seharusnya Tidak
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") 2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK	Ada	Tidak	Seharusnya Tidak Tidak
 Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK Adakah TDK Belanja Netto 	Ada	Tidak	Seharusnya Tidak Tidak Tidak
 Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK Adakah TDK Belanja Netto Adakah TDK Pendapatan Netto 	Ada	Tidak	Seharusnya Tidak Tidak Tidak Tidak
 Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-Ik menu daftar >> pagu minus") Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK Adakah TDK Belanja Netto Adakah TDK Pendapatan Netto Adakah TDK Kas di Bendahara BLU 	Ada	Tidak	Seharusnya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
 Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK Adakah TDK Belanja Netto Adakah TDK Pendapatan Netto Adakah TDK Kas di Bendahara BLU Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran 			Seharusnya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
 Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK Adakah TDK Belanja Netto Adakah TDK Pendapatan Netto Adakah TDK Kas di Bendahara BLU Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran Adakah TDK Kas Hibah e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satke 			Seharusnya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") 2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK 3. Adakah TDK Belanja Netto 4. Adakah TDK Pendapatan Netto 5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU 6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran 7. Adakah TDK Kas Hibah e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satkedan tidak aktif tidak bersaldo	er DIPA Ak	ctif, Tidak	Seharusnya Tidak Aktif Bersaldo
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-Ik menu daftar >> pagu minus") 2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK 3. Adakah TDK Belanja Netto 4. Adakah TDK Pendapatan Netto 5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU 6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran 7. Adakah TDK Kas Hibah e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satkedan tidak aktif tidak bersaldo Format LRA	er DIPA Ak	ctif, Tidak	Seharusnya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Seharusnya
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-Ik menu daftar >> pagu minus") 2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK 3. Adakah TDK Belanja Netto 4. Adakah TDK Pendapatan Netto 5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU 6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran 7. Adakah TDK Kas Hibah e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satke dan tidak aktif tidak bersaldo Format LRA - Apakah Format LRA telah sesuai (terdapat Pos SURPLUS/DEFISIT dan SILPA/SIKPA)?	er DIPA Ak	ctif, Tidak	Seharusnya Tidak
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") 2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK 3. Adakah TDK Belanja Netto 4. Adakah TDK Pendapatan Netto 5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU 6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran 7. Adakah TDK Kas Hibah e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satkedan tidak aktif tidak bersaldo Format LRA - Apakah Format LRA telah sesuai (terdapat Pos SURPLUS/DEFISIT dan SILPA/SIKPA)?	Ya	ctif, Tidak	Seharusnya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Seharusnya
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN") LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") 2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Pengecekan TDK 3. Adakah TDK Belanja Netto 4. Adakah TDK Pendapatan Netto 5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU 6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran 7. Adakah TDK Kas Hibah e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satke dan tidak aktif tidak bersaldo Format LRA - Apakah Format LRA telah sesuai (terdapat Pos SURPLUS/DEFISIT dan SILPA/SIKPA) ? LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun	Ya	ctif, Tidak	Seharusnya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Aktif Bersaldo Seharusnya Ya

Page 5 of 7 *Ver.02/01/2020*

Telaah pos Lain-lain		Tidak	Seharusnya
4. Apakah pos Lain-lain terisi			Ya/Tidak
5. Jika pos Lain-lain terisi apakah benar			Ya

Sampai dengan saat ini pos Lain-lain terisi hanya diakibatkan koreksi kas karena selisih kurs belum terealisasi (311313) dan koreksi saldo awal Kas dan Bank BLU (311315)

LAPORAN ARUS KAS

	Sama	Tidak	Seharusnya
Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada 1.			Sama
Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU			Sairia
2. Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK			Sama
3. Rincian Saldo Akhir Kas LAK:	Sama	Tidak	Seharusnya
a. Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Sama
b. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Sama
c. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Sama
d. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Sama
e. Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya = Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Percobaan BLU			Sama
4. Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca antar lain:	Sama	Tidak	Seharusnya
a. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca			Sama
b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran = Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca			Sama
5. LAK dan Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
Jika ada Realisasi akun 53xxxx, pada LAK ada Saldo pada Aktivitas Investasi, juga sebaliknya			Ada
6. Memastikan transaksi koreksi dilakukan dengan benar dan masuk dalam LAK	Ada/Ya	Tidak	Seharusnya
a. Adakah koreksi terkait Saldo Awal Kas?			Ada/Tidak
b. Apakah transaksi koreksi Kas tersebut disajikan di LAK sebagai Koreksi Saldo Kas?			Ya/Tidak
Jika tidak tersaji di LAK berarti jurnal yg dilakukan tidak melalui akun perantara "koreksi lain-lair SAL BLU (311315)", perbaiki.	n (391119)"	dan/atau	ı "Penyesuaian
Jika baris Koreksi Saldo Kas pada LAK terisi, apakah memang merupakan koreksi saldo c. awal/tahun lalu (bukan koreksi tahun berjalan) ?			Ya

DATA TRANSAKSI RESIPROKAL					
Satker BLU Sebagai Penerima Kerja Ada Tidak Seharusnya					
Adakah pendapatan BLU yang diperoleh dari Satker Lain (BLU dan/atau Non-BLU) Lingkup 1. Pemerintah Pusat?			Ada/Tidak		
Jika ada, adakah data transaksi resiprokal pada Monitoring Resiprokal di Aplikasi e-Rekon&LK?			ada		
Jika belum ada data transaksi resiprokal pada Monitoring Resiprokal di Aplikasi e-Rekon&LK, lakuk	an perek	aman inf	ormasi Satker		

Pemberi Kerja di Aplikasi SAIBA pada menu Transaksi >> Daftar Transaksi Resiprokal dan lakukan upload ulang data SAIBA pada
Aplikasi e-Rekon&LK

	Satker BLU Sebagai Pemberi Kerja	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah data satker BLU penerima kerja mencatat pendapatan transaksi resiprokal pada		Ada/Tidak	
	Monitoring Resiprokal di Aplikasi e-Rekon&LK?			Aud/Hudk
	Jika memang ada, lakukan perekaman informasi Satker BLU Penerima Kerja di Aplikasi SAIBA			
	pada menu Transaksi >> Daftar Transaksi Resiprokal dan lakukan upload ulang data SAIBA pada			ada
	Aplikasi e-Rekon&LK.			

Jika belum ada data transaksi resiprokal pada Monitoring Resiprokal di Aplikasi e-Rekon&LK, lakukan perekaman informasi Satker BLU Penerima Kerja di Aplikasi SAIBA pada menu Transaksi >> Daftar Transaksi Resiprokal dan lakukan upload ulang data SAIBA pada Aplikasi e-Rekon&LK

Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Resiprokal berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2018 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal Antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019

Page 6 of 7 *Ver.02/01/2020*

	PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAI	HUN SEBELUMN	IYA		
	laah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesa adalah contoh-contoh telaahnya.	ikan dan terjadinya t	emuan	yang beru	ılang. Dibawah
Pe	rtanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?				Ya
2.	Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
3.	Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
4.	Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)				Ya
5.	Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya b terkait?	eserta dokumen			Ya
6.					Ya
	CATATAN ATAS LAPORAN KEU	JANGAN			
Ke	sesuaian antara Face Laporan dan CaLK		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Rincian yang ada di CALK sama dengan LK (Neraca Percobaan)				Sama
	Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di Co	aLK.			
Ke	cukupan pengungkapan pada CaLK		Ya	Tidak	Seharusnya
2.	Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umur Neraca ?	n, LO, LPE dan			Ya
3.	Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah sesuai format ?	secara memadai			Ya
4.	Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?				Ya
5.	Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?				Ada
	aran selui	ruh akun tsb.,			
6.	Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelas	an akun Koreksi?			Ya
	LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAP	ORAN KEUAN	GAN		
	"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perb	, -			
	Mengetahui Pejabat Penyusun LK, Penelaah,	, 202	20		
	() (NIP)			

Page 7 of 7 *Ver.02/01/2020*